

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang menjadi titik acuan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian, perlu adanya penelitian terdahulu sebagai suatu referensi bagi peneliti untuk dapat memperluas serta mempertajam teori yang akan di gunakan. Tidak hanya itu, Peneliti terdahulu juga memiliki fungsi untuk dapat menjadi suatu perbandingan antar peneliti yang telah di lakukan sebelumnya dengan penelitian yang sekarang di lakukan. Kemudian, juga untuk mengetahui metode penelitian yang di gunakan sebelumnya serta sebagai tolak ukur dalam melakukan penulisan penelitian yang tengah di lakukan dan berdasarkan kepada peneliti terdahulu. Berdasar pada hal tersebut, pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan penelitian ini, sebagai berikut :

**Penelitian pertama, Hamsa Hamida (2022)** Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Analisis Kegagalan Implementasi Kebijakan Pembangunan Trotoar Ramah Disabilitas Tunanetra” Metode yang di gunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian ini hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab kegagalan implementasi pembangunan trotoar ramah disabilitas tunanetra adalah

komunikasi yang tidak jelas dan tidak konsisten sumber daya yang kurang dan kurang pengalaman, sulitnya mendapatkan material guiding block, ketidak telitian pengawas dalam mengawasi proses pembangunan serta adanya disposisi yang kurang mendukung implementasi kebijakan karena tidak memahami aturan pemasangan guiding block sebagaimana tertulis dalam peraturan yang ada.

**Penelitian kedua, Ulfa, M., & Putri, N (2020)** Universitas Negeri Padang yang berjudul “Implementasi Pembangunan Pedestrian Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang”, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa belum ada manfaat yang ditunjukkan terkait dengan perubahan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap pejalan kaki. Faktor yang muncul pada kinerja, adanya pedestrian yang memadai namun kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas itu sendiri.

**Penelitian ketiga, Demirza, Monica Furi (2016)** Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Implementasi Kebijakan Disabilitas Pada Pembangunan Fasilitas Umum Sebagai Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Kota Malang”, Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif beerdasarkan hasil yang telah di lakukan menunjukkan bahwa bahwa implementasi Kebijakan Disabilitas di Kota Malang dilaksanakan

secara bertahap. Fasilitas pejalan kaki masih dibangun di beberapa tempat yang ramai, dan setiap tahunnya akan dibangun secara bertahap. Fasilitas untuk sekolah termasuk masih sangat minim, karena belum ada persyaratan untuk fasilitas ramah gangguan dari pemerintah. Penyandang disabilitas juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, untuk dapat mengikuti program kesejahteraan sosial salah satunya yaitu rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Malang telah memberikan fasilitas penyandang disabilitas ramah pejalan kaki, pendidikan untuk ABK dan program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian dan perlindungan pemerintah Kota Malang terhadap hak penyandang cacat. Hambatan yang terjadi yaitu, fasilitas ramah gangguan di area sekolah masih belum menjadi prioritas. Kemudian, fasilitas pelayanan ramah pejalan kaki masih dibangun secara bertahap setiap tahunnya, tergantung dana yang diberikan.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan Sebagai Rujukan**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
Hamsa hamidah	Analisis Kegagalan	Ruang Lingkup penelitian sama	Penelitian terdahulu

(Universitas Sebelas Maret) Tahun Terbit: 2022	Implementasi Kebijakan Pembangunan Trotoar Ramah Disabilitas Tunanetra	sama membahas Implementasi Pembangunan Trotoar/pedestrian dalam menggunakan metode penelitian kualitatif	melakukan penelitian mengenai <i>Analisis</i> <i>Kegagalan</i> <i>Implementasi</i> <i>Pembangunan</i> <i>Trotoar Rama</i> <i>Disabilitas.</i> Sedangkan Peneli saat ini melakukan penelitian terkait Keberhasilan Implementasi pembangunan terhadap kenyamanan penguna pedestrian. Lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti
--	---	--	--

			<p>terdahulu adalah di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta.</p> <p>Sedangkan peneliti yang melakukan penelitian saat ini memiliki lokasi penelitian di Jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat. Penelitian terdahulu menggunakan teori George Edwards</p> <p>III. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan Teori Thomas B. Smith</p>
Ulfa, M., & Putri, N.	Implementasi Pembangunan	Ruang Lingkup penelitian sama	Penelitian terdahulu

<p>(Universitas Negeri Padang) Tahun Terbit : 2020</p>	<p>Pedestrian Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang</p>	<p>sama membahas Implementasi Pembangunan Trotoar/pedestrian dalam menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>melakukan penelitian mengenai <b>Implementasi Pembangunan Pedestrian Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang</b> Sedangkan Peneliti saat ini melakukan penelitian terkait Keberhasilan Implementasi pembangunan terhadap kenyamanan pengguna pedestrian. Lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdahulu adalah di</p>
--	---	---	---




			<p>Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang. Sedangkan peneliti yang melakukan penelitian saat ini memiliki lokasi penelitian di Jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat. Penelitian terdahulu menggunakan teori George Edwards III. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan Teori Thomas B. Smith</p>
Demirza, Monica Furi (Universitas Muhammadiyah Malang)	Implementasi Kebijakan Disabilitas Pada Pembangunan Fasilitas Umum Sebagai Bentuk	Ruang Lingkup penelitian sama sama membahas Implementasi Pembangunan Trotoar/pedestrian	Penelitian terdahulu melakukan penelitian mengenai <b>Implementasi</b>

<p>Tahun Terbit : 2016</p>	<p>Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Kota Malang</p>	<p>dalam menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p><b><i>Kebijakan Disabilitas Pada Pembangunan Fasilitas Umum Sebagai Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Kota Malang</i></b> sedangkan Peneli saat ini melakukan penelitian terkait Keberhasilan Implementasi pembangunan terhadap kenyamanan penguna pedestrian. Lokasi penelitian</p>
--------------------------------	--	--	--





			<p>yang di lakukan oleh peneliti terdahulu adalah di Jl. Gajah Mada Kota Malang.</p> <p>Sedangkan peneliti yang melakukan penelitian saat ini memiliki lokasi penelitian di Jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat. Penelitian terdahulu menggunakan teori Grindle.</p> <p>Sedangkan peneliti saat ini menggunakan Teori Thomas B. Smith</p>
--	--	---	--

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Generalisasi atas implementasi diselenggarakan setelah rancangan dinilai sudah matang. Adapun makna dari Implementasi ialah kegiatan yang mencakup upaya atas tindakan, aktivitas, aksi, berkontribusi mekanisme dari metode, sehingga, implementasi tidak hanya berkutat pada aktivitas yang monoton, namun mencakup segala upaya yang telah direncanakan dengan matang dengan mempunyai fungsi sebagai entitas dalam menggapai hal yang dihendaki.

Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

Sedangkan William (Taufik dan Isril, 2013:136), “dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan

material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Salusu (Tahir, 2014:55-56) menyatakan, “implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah”. Selanjutnya Kaporu (2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: a. Kondisi lingkungan (environmental conditions). b. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship). c. Sumberdaya (resources). d. Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies).

Dalam pandangan Pressman serta Wildavsky (1984), “Implementasi didefinisikan sebagai korelasi antara pembuat keinginan dengan sarana action untuk menggapai tujuan tersebut, atau kapabilitas untuk menciptakan dalam hubungan antara yang diinginkan dengan cara untuk menggapainya.” (Tangkilisan, 2003: 17).<sup>7</sup>

Sedangkan makna dari Implementasi didalam kebijakan Patton dan Sawaciki (dalam Tangkilisan, 2009: 9) ialah, “Implementasi terkait beragam kegiatan yang bertujuan melaksanakan agenda, dimana pada posisi ini badan pelaksana berperan aktif dalam mengatur, menafsirkan dan melaksanakan kebijakan yang sudah di pilih.” Dalam realisasinya, implementasi ialah sebuah upaya ketika hendak menggapai pedoman

---

<sup>7</sup> Tangkilisan, “. Implementasi Kebijakan Publik”. Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta

yang akan dilaksanakan, seperti realisasi didalam manifestasi strategi ataupun mencakup penyusunan dari turunan atas pelatihan secara mainstream, sehingga tahapan tersebut memerlukan pendekatan demi menghasilkan aktivitas yang sudah direalisasikan.

Aspek implementasi didalam kebijakan mempunyai kaitan dengan pengoperasian, dimana setelah problem masuk kedalam agenda, maka beragam opsi yang dirancang serta realisasinyapun dilaksanakan dengan beragam upaya. Selanjutnya, pemerintah menguji revolusi atas kebijakannya lalu menerapkan revolusi tersebut. Beberapa upaya didalam mengimplementasikan sesuatu, yakni upaya dalam memberikan tekanan atas realisasi kebijakan secara mulus dan tepat sasaran sebagaimana yang telah ditargetkan.

Dalam pandangan Van Meter dan Van Horn dalam (Budi Winarno, 2008), implementasi didefinisikan sebagai, "Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk menggapai revolusi besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang diselenggarakan oleh instansi

publik yang dikerahkan untuk menggapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.”<sup>8</sup>

Adapun ragam dari kebijakan yang lebih menitik beratkan ragam dari implementasi kebijakan, sebagaimana didalam presfektif bottom up yang dikemukakan oleh **Thomas B. Smith**. Dalam pandangan Smith (1973) dalam Nuraei,A Nurasa, H., & Widianingsih, I. (2012), “Implementasi Agenda sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kota Bandung. Upaya implementasi kebijakan ditelaah dari upaya kebijakan dan revolusi sosial serta politik, dimana kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan pemulihan atau revolusi dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.” Dalam pandangan Smith didalam mengupayakan implementasi yakni terdapat empat variabel didalam kebijakan yang perlu diberikan atensi ialah sebagai berikut, “(1) **Kebijakan yang ideal (*idealized policy*)**, (2) **Kelompok Sasaran (*target groups*)**, (3) **Instansi Pelaksana (*implementing organization*)**, (4) **Faktor-faktor lingkungan (*enviromental factors*)**.”

Sebagaimana pemaparan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya implementasi kebijakan tidak akan diberlakukan sebelum intensi dan sasaran telah ditentukan atau diidentifikasi oleh kesepakatan dari kebijakan. Sehingga, implementasi ialah sebuah upaya didalam aktivitas yang

---

<sup>8</sup> Budi Winarno. “Kebijakan Publik”,2008, Pt. Buku Kita: Jakarta. Hal 146-147

diselenggarakan oleh beragam pihak dengan menghasilkan sesuatu yang selaras dengan intensi atau target dari kebijakan itu sendiri.

### 2.2.2 Pembangunan

Pembangunan ialah hasil atas aktivitas serta agenda yang diciptakan oleh pemerintah demi masyarakat sebagai upaya dalam menunjang keberhasilan dalam menggapai kesejahteraan sosial, intensi ekonomi sosial, demografi politik dan lainnya dengan cara melakukan peningkatan terhadap ekspansi. Sedangkan didalam realisasinya, pembangunan merupakan upaya ataupun strategi yang dikerahkan demi menggapai intensi yang sudah dikemukakan.

Menurut Siagian pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.” Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna : “(a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir; (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus; (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (d) pembangunan mengarah kepada modernitas; (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan

pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.”

Hal senada disampaikan oleh Tjokrominoto yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai “citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut : (1) pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. (2) pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga. (3) pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (value free). (4) pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai meta-disciplinary phenomenon, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, the ideologi of developmentalism. (5) pembangunan sebagai konsep yang syarat nilai (value loaded) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat. (6) pembangunan menjadi culture specific, situation specific, dan time specific.”

Pembangunan ialah sebuah usaha ataupun rancangan dari agenda sebagai upaya didalam pertumbuhan serta revolusi yang terstruktur dan dilaksanakan secara sadar oleh bangsa dan Negara, serta pemerintah sebagai upaya didalam membimbing bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan wajib untuk diupayakan dan dirancang secara sadar.

Maksudnya, baik pemerintah pusat maupun daerah wajib memberikan fokus kedalam ekspansi pedesaan demi keberhasilan dari intensi ekspansi nasional.<sup>9</sup>

Pembangunan ialah upaya yang terstruktur dan berlangsung secara *continous* demi menciptakan situasi yang mampu menghasilkan beragam alternatif yang sah demi keberhasilan atas realisasi dari aspirasi masyarakat yang humanistik. (Rustiadi, 2011:119). Pembangunan yang mempunyai kaitan dengan konsepsi dari pertumbuhan (growth), rekonstruksi (reconstruction), modernisasi (modernization), westernisasi (westernization), revolusi sosial (social change), pembebasan (liberation), pembaharuan (innovation), ekspansi bangsa (national building), ekspansi nasional (national development), pengembangan serta pengarahannya. (Ndraha, 1990: 2-13)

United Nations of Development Agenda (UNDP) memberikan representatifnya mengenai pembangunan, terlebih pada pembangunan manusia yakni, “Salah satu upaya untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (a process of enlarging people’s choice).” Mengenai konsepsi tersebut, para penduduk diposisikan sebagai destinasi terakhir (the ultimate end), bukan sebagai perlengkapan, metode, maupun instrumen didalam ekspansi, sebagaimana yang ditelaah melalui formasi modal manusia

---

<sup>9</sup> P.Siagian, “ Filsafat Administrasi”, Jakarta: Gunung Agung, 2005



(human capital formation), sedangkan didalam upaya pembangunan dipandang sebagai sebuah sarana ketika menggapai intensi tersebut. Adapun pembangunan sendiri mampu untuk dikonseptualisasikan kedalam manifestasi pemulihan yang berlangsung secara *continuous* terhadap masyarakat ataupun sistem sosial yang mencakup segala aspek dengan destinasi kehidupan yang lebih mapan ataupun lebih manusiawi. Kemudian intensi dari pembangunan ialah mengupayakan atau menciptakan atau mengatur entitas yang belum hadir.

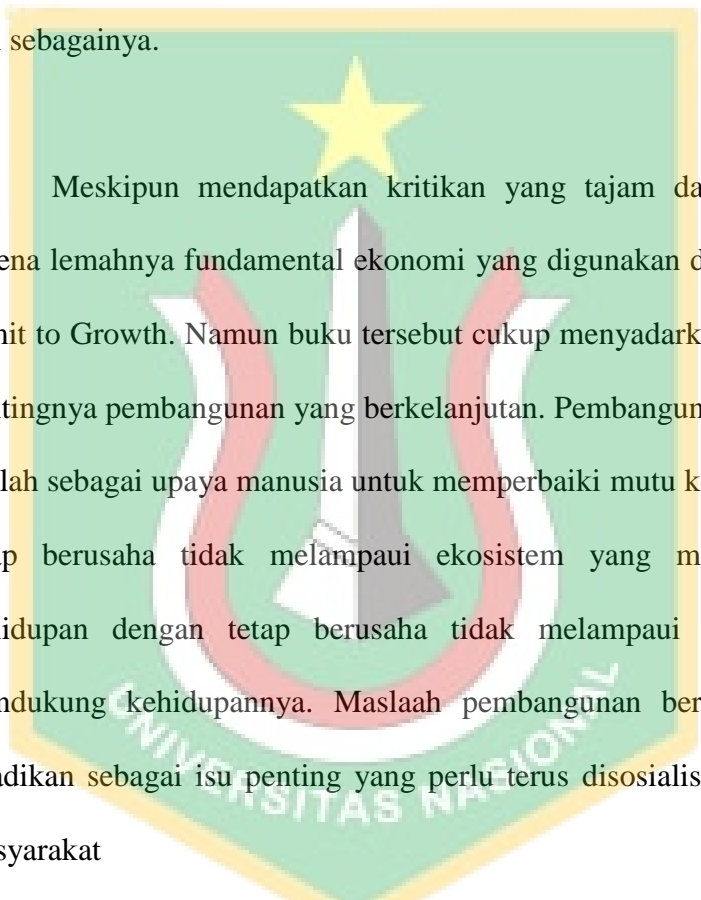
Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan adalah bagaimana menghadapi trade-off antara pemenuhan kebutuhan pembangunan di satu sisi upaya mempertahankan kelestarian lingkungan di sisi lain. Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari.<sup>10</sup>

Pembangunan nasional sebagai salah satu strategi yang dinamis dengan destinasi kondisi sosial yang lebih mapan, atau yang lebih terbaru,

---

<sup>10</sup> Jaya, Askar. 2004. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Tugas Individu Semester Ganjil 2004. Pengantar Falsafah Sains (PPS-702). Hal 1.

jelas merupakan dampak dari gejala sosial yang mempunyai banyak dimensi dan dapat dilakukan dengan menerapkan metode pendekatan yang beragam dengan mengimplementasikan ragam pengetahuan, seperti ekonomi pembangunan, sosiologi pembangunan, pembangunan politik, teknologi pembangunan, pembangunan hukum, administrasi pembangunan dan sebagainya.



Meskipun mendapatkan kritikan yang tajam dari para ekonom karena lemahnya fundamental ekonomi yang digunakan dalam model The Limit to Growth. Namun buku tersebut cukup menyadarkan manusia akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Maslah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah sejak lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (sustainability) sendiri baru muncul beberapa dekade, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap

keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* dalam kesimpulannya bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam yang tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (on sustainable basis).

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa ini maupun masa mendatang. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (1990) pembangunan (yang dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu : (1) tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources ; (2) tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources atau replaceable resource.

Senada dengan konsep diatas, Sutamuhardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

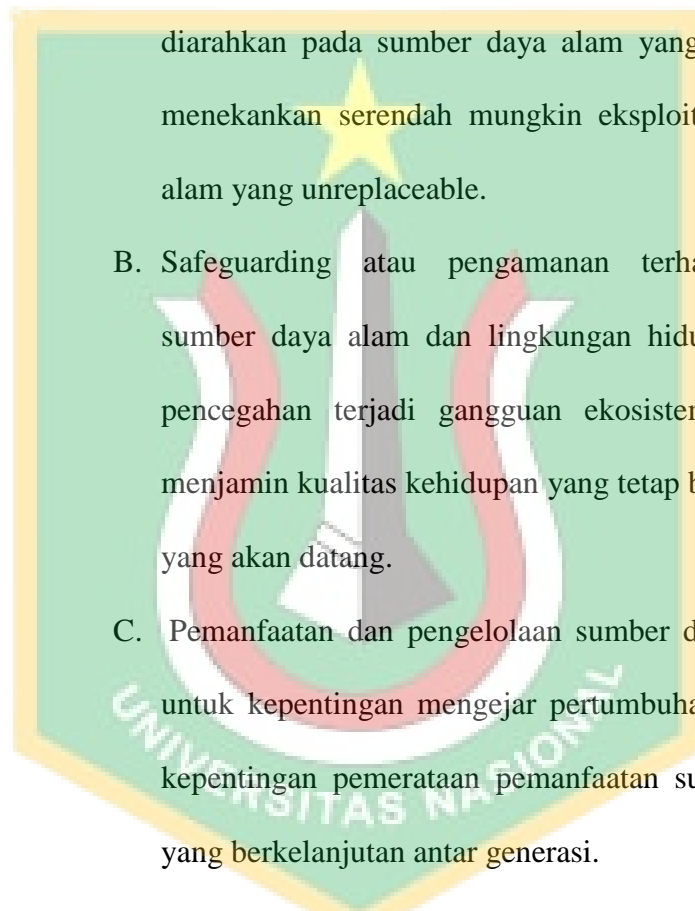
A. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergeneration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.

B. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

C. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.

D. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).

E. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang



mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.

F. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dari sisi ekonomi, Fauzi (2004) mengatakan setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral, generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini

Sebagai salah satu upaya didalam ekspansi, pembangunan nasional ialah rancangan atas revolusi majemuk didalam bidang politik, sosial serta ekonomi. Tjokroamidjojo dan Mustapadidjaya memberikan pernyataannya terkait pembangunan yakni, “Upaya pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila syarat-syarat sosial politik sudah terpenuhi, artinya suatu bangsa sudah menggapai tingkat kematangan tertentu dalam bidang politik dan sosial.”

Dalam pandangan Rustiadi, “Pembangunan harus memenuhi tiga komponen dasar yang dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan paling hakiki yaitu kecukupan (sustainability) memenuhi keperluan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom) dalam memilih.”<sup>11</sup> Dwijowijoto menginventarisasikan latar belakang yang merupakan kunci atas pembangunan yang menghasilkan keberhasilan maupun kegagalan<sup>12</sup>, yakni:

#### 1. Faktor Kepemimpinan

Kepemimpinan menjadi aspek utama didalam keberhasilan dari pembangunan, sebab kepemimpinan merupakan peletak dari visi dan misi atas pembangunan. Pada setiap instansi, pemimpin mengemban tugas

---

<sup>11</sup> Erna Rustiadi. *Perencanaan Dan Pembangunan Daerah*. Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011 hal.120.

<sup>12</sup> Dwijowijoto, Ryant Nugroho. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2003 hal .296-318.

dengan mengkreasikan nilai kepada instansi. Adapun lima kunci dari superioritas mengenai kepemimpinan, yakni:

## 2. Faktor Manajemen

Manajemen menciptakan instansi agar berjalan secara maksimal. Sebagaimana gagasannya secara garis besar, manajemen ialah sebuah rangkaian dari pekerjaan yang mencakup pedoman secara metodologis, sekuensial, serta mampu untuk divalidkan secara keilmuan dengan meliputi susunan rencana, kegiatan didalam organisasi, realisasi, kepemimpinan, serta pengelolaan (termasuk monitoring serta evaluasi), kemudian diinput kedalam upaya strategi, lalu membentuk daur yang dilakukan secara *continous*.

Strategi utama ketika melakukan menciptakan budaya manajemen ialah dengan menata sistem pendidikan yang selangkah dengan kebudayaan manajemen sedini mungkin. Adapun kebijaksanaan didalam pendidikan dimaksudkan demi memberikan akomodasi dengan empat karakter budaya manajemen yakni metode, tim, kedisiplinan, serta pembelajaran. strategi kedua yakni menciptakan iklim serta infrastruktur yang selaras demi menghasilkan kebudayaan manajemen di tengah-tengah masyarakat.

## 3. Faktor Keinstansian

Setiap negara serta masyarakat modern diperkirakan mempunyai tiga ragam instansi yang mengikatnya ataupun menjadi pihak didalam instansi tersebut. Adapun instansi yang dimaksud ialah instansi publik, bisnis, maupun nirlaba.

#### 4. Faktor Sistem

Instrumen sistem merupakan sebuah pedoman yang bersifat internal terhadap kesuksesan maupun ketidak suksesannya sebuah pembangunan. Adapun instrumen dari sistem yang paling utama ialah keprofesionalan. Profesional ialah tindakan yang mempunyai tumpuan terhadap tiga aspek, yakni kepemilikan atas pengetahuan, kapabilitas dalam memberikan distribusi didalam pengetahuan menjadi sebuah keterampilan, serta mempunyai bekal integritas. Adapun instrumen didalam sistem yang kedua ialah sikap yang positif. Kemudian, intrumen didalam sistem ketiga ialah pembelajaran tanpa henti.

#### 5. Faktor Kekayaan Alam

Sebuah bangsa atau negara yang mempunyai kelimpahan atas alam merupakan sebuah *privilege* yang sangat fantastik. Kehadiran dari kekayaan alam tidak hanya terpaku pada kapital ekonomi, namun menjadi kapital didalam politik. Adapun kekayaan alam yang melimpah merupakan sumber dari perkembangan dari kesejahteraan rakyat, dengan menemukan



kebenaran dalam manajemen dan melaksanakan manajemen secara kompeten sekaligus tepat sasaran. Selain keberadaannya yang menjadi *privilege*, kekayaan alam juga dapat menjadi sebuah ancaman bagi negara yang mempunyai kelimpahan didalamnya, sebab ditemukan potensi dalam menciptakan pemiliknya menjadi terlena serta malas untuk mempunyai produktivitas.

### 2.2.3 Pedestrian

Asal kata pedestrian diambil dari bahasa Yunani yang mengambil kata pedos dengan makna kaki, sehingga pedestrian mempunyai maksud sebagai pejalan kaki atau orang yang berjakan kaki. Sedangkan, jalan merupakan sebuah media yang terdapat diatas bumi dengan memberikan kemudahan bagi manusia ketika berjalan. Maka, pedestrian dapat dinyatakan sebagai sebuah pergerakan ataupun perpindahan individu atau manusia yang berasal dari satu tempat ke tempat lain sebagai destinasi dengan mengaplikasikan moda jalan kaki. Atau secara harfiah, pedestrian berarti "*person walking in the street*", yang mempunyai arti sebagai seorang individu yang berjalan di jalan (Uir Planologi: 2011). Lajur pedestrian didalam konteks perkotaan biasanya dimaksudkan sebagai ruang khusus untuk pejalan kaki yang berfungsi sebagai sarana keberhasilan yang dapat melindungi pejalan kaki dari bahaya yang datang dari kendaraan bermotor. Di Indonesia lebih dikenal sebagai trotoar, yang

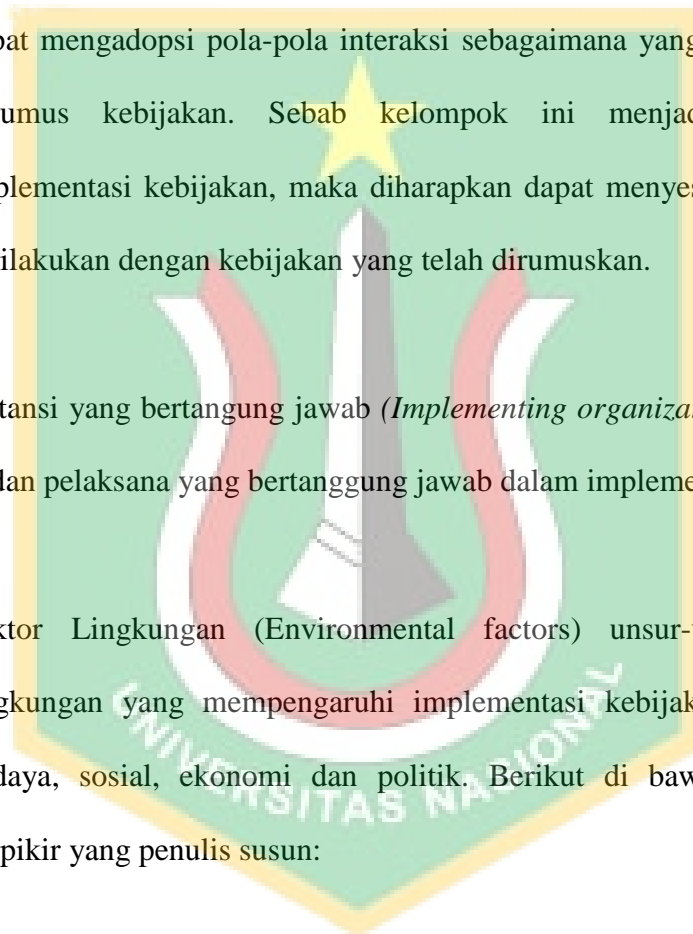
berarti lajur jalan kecil selebar 1,5 sampai 2 meter atau lebih memanjang sepanjang jalan umum.

Pedestrian ialah lajur pejalan kaki yang terletak pada daerah milik jalan, diberi lapisan permukaan, diberi elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan lajur lalu lintas kendaraan. Trotoar yang berfungsi sebagai tempat untuk pejalan kaki merupakan prasarana yang sangat penting bagi pejalan kaki, maka harus di desain sedemikian rupa sehingga memungkinkan bagi pejalan kaki merasakan kelancaran dan kenyamanan. Lajur pedestrian yang berupa trotoar merupakan wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melaksanakan aktivitas dan untuk membuahkkan pelayanan kepada pejalan.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Dalam membuahkkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka di butuhkan tehnik untuk menggapai suatu keberhasilan dalam instansi. Oleh Sebab itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk dapat menelaah bagaimana penerapan pedestrian dalam mengurangi angka kecelakaan pejalan kaki di DKI Jakarta, maka Penulis mengaplikasikan teori strategi **Thomas B. Smith** yang terdiri dari:

1. Kebijakan yang di **idealkan** (*Idealized policy*) yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target kelompok untuk melaksanakannya.
2. Sasaran (*Target groups*) yaitu bagian dari *stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Sebab kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
3. Instansi yang bertanggung jawab (*Implementing organization*) yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. Faktor Lingkungan (*Environmental factors*) unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik. Berikut di bawah ini kerangka berpikir yang penulis susun:



**Gambar 2.3 Kerangka Berpikir**

**Identifikasi Masalah:**

1. Kurangnya ruang untuk pejalan kaki berjalan di sepanjang badan jalan yang berdampingan dengan kendaraan
2. Banyaknya badan jalan yang dikorbankan sebagai kapling parkir bagi para penunjang bisnis
3. Banyaknya disfungsi pedesetrian

**Dasar Kebijakan:**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan

**Implementasi Menurut Thomas B. Smith**

1. *Idealized Policy*
2. *Target Groups*
3. *Implementing Organization*
4. *Environmental Factors*

**Implementasi Pembangunan Pedestrian di Jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat**